



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



RENCANA KERJA TAHUN 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana pembangunan Tahunan Daerah Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah dimana dalam RENJA SKPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam pelaksanaan RENJA SKPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam Renja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tergambar Rencana Kerja dan Capaian kinerja untuk Tahun 2021. Rencana Kerja Merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam tahun 2022, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan..

Gunung Sugih, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. ASRUL SANI

NIP. 19660621 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPENDA Tahun lalu.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Kab. Lamteng	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA.....	11
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	17
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA	17
3.2. Program dan Kegiatan BAPENDA	19
3.3. Telaahan Tugas dan Fungsi BAPENDA	21
BAIV Penutup	24
BAB V Lampiran– lampiran.....	26

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rangka mensukseskan Kebijakan Nasional tentang pelaksanaan otonomi Daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program –program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah , Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang nyata melalui penyusunan dan pelaksanaan program – program kerja yang dapat dilaksanakan , tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rancangan awal rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah yang definit. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh Karena itu, Penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel bersamaan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD,

Dalam rangka implementasi peraturan perundangan tersebut sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
 18. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atau Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
 21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

o Maksud

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas dan pelaksanaan tugas pelayanan public sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan , strategi dan kebutuhan Badan yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD,KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2022 dan menjadi alat Bantu 2022 Badan Pendapatan Daerah secara terukur.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah,maka diharapkan semua pemangku kepentingan yang terlibat baik pimpinan, staf , maupun mitra kerja secara bersama- sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana kerja tersebut diterjemahkan dari kebijakan umum daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

- **Tujuan**

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, bertujuan :

- ❖ Menyediakan Pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan Sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintahan Propinsi dan Pusat.
- ❖ Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah secara Sinergis, Koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- ❖ Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah.
- ❖ Memberikan informasi tentang kondisi umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar perencanaan umum.

- **Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Sistematika Penyusunan sebagai berikut:

- I. **Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, Landasan Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

- II. **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra yang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja pada tahun 2022 , serta kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memaparkan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

IV. Penutup

Pada Bab ini merupakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Renja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan , pelaksanaan program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
- Tujuan yang dikehendaki
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah , uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi ,pengendalian dibidang pendapatan Daerah;
- Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah;

- Melaksanakan Pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- Melaksanakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Melaksanakan Kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Meningkatkan Kinerja Birokrasi

Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah menuntut tercapainya produktivitas kerja yang optimal. Hasil kinerja optimal tersebut diperoleh dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi.

Meningkatkan Pelayanan Publik

Implementasi utama Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat adalah meningkatnya kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Standar pelayanan publik dalam konteks reformasi birokrasi adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi, dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan Legislatif telah mencanangkan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang meliputi program prioritas di bidang penataan organisasi, penyempurnaan pelayanan Pajak Daerah, peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Saat ini Gedung kantor berada di kompleks Kantor Dinas Kabupaten Lampung Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah didukung oleh 56 pegawai dan 18 orang Tenaga Kontrak sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 75 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai :
 - Jumlah PNS : 56 Orang
 - Jumlah Non PNS : 18 Orang
- Jumlah Jabatan struktural :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 Orang
 - Eselon IV : 15 orang
- Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :
 - PNS Golongan IV : 3 Orang
 - PNS Golongan III : 44 Orang
 - PNS Golongan II : 9 Orang
 - PNS Golongan I : - Orang
 - Non PNS : 18 Orang
- Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
 - Pendidikan S2 : 8 Orang
 - Pendidikan S1 : 28 Orang
 - Pendidikan D3 : 7 Orang
 - Pendidikan SLTA : 31 Orang
 - Pendidikan SD : - Orang

Tabel perincian sebagai berikut :

No	Eselon dan Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	TKS
1	II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	III	3	2	-	-	-	-	2	3	-	-	-
3	IV	3	10	-	2	-	-	-	15	-	-	-
4	Non Eselon	2	15	7	11	-	-	-	26	9	-	-
5	Kontrak	-	-	-	15	-	3	-	-	-	-	18
6	Sub Jumlah	8	28	7	28		3	3	44	9	-	18
7	Jumlah	74						74				

Dalam Rangka peningkatan Sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah, melalui Bidang Organisasi Kab. Lampung Tengah telah dilakukan analisis dan evaluasi Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan setiap jabatan, menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Analisis dan evaluasi Tupoksi jabatan berkontribusi dalam penyempurnaan pelayanan Pajak dengan menghasilkan uraian jabatan dari setiap jabatan yang tersedia sehingga setiap individu yang menjabat dapat menghasilkan kinerja yang lebih terukur sesuai dengan tugas yang diembannya. SOP sebagai standar prosedur kerja dibuat agar dapat menciptakan pola kerja yang efektif dan cepat, serta proses pelayanan Pajak Daerah yang transparan dan tidak berbelit-belit. Sedangkan analisis beban kerja diharapkan juga mampu mewujudkan efektivitas kerja dan efisiensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah proses pelayanan Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dengan ketiga alat tersebut, dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Masing-masing hal tersebut diarahkan untuk menghasilkan proses pelayanan Pajak daerah yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas.

Perubahan paradigma Kepegawaian di Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Tengah, ditandai dengan kajian mengenai penajaman fungsi Kepegawaian sebagai unit yang melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

Prinsip peningkatan manajemen SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan SDM yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen, peningkatan disiplin, dan hingga saat ini Jumlah SDM di Badan Pendapatan Daerah berjumlah 74 orang dengan beragam jenis tingkat pendidikan dengan memiliki sertifikasi diklat-diklat teknis fungsional.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka melaksanakan program / kegiatan dan pencapaian sasaran , antara lain :

1. Dampak pandemi covid 19 mengakibatkan pendapatan menurun.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk pembayaran pajak.
3. Kurang optimalnya wajib pajak rumah makan, pajak hiburan dan parkir dalam menyampaikan laporan transaksi penerimaan pajak.
4. Masih banyaknya para Wajib Pajak Air Tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pemakaian Air (SIPA) tapi belum memasang Water Meter sehingga pajak yang disetorkan belum optimal.

5. Sanksi Hukum belum diterapkan sepenuhnya terhadap para Wajib Pajak.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Bidang Perpajakan.

Sebagaimana aparatur pada umumnya, SDM yang ada sangat berorientasi pada Tugasnya / Rutinitas daripada pencapaian target / pencapaian kinerja sebagai dampak mekanisme pengawasan yang berlandaskan pada format-format evaluasi yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas.

Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .

Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah konsultasi dan persetujuan penetapan kebijaksanaan tingkat daerah.
2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah.
3. Dukungan Dinas/Instansi baik vertikal maupun horizontal.
4. Pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung.
5. Dukungan perguruan tinggi, Lembaga Profesi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten dan Partisipasi Masyarakat

A. Hambatan (Threats)

- Kurangnya Koordinasi dengan Dinas dan Instansi teknis terkait dalam rangka menghimpun pendapatan daerah dan mendata sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang ada.
- kurangnya Pengetahuan/Kwalifikasi SDM (Staf) PNS yang menguasai bidang administrasi perpajakan.
- Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

B. Upaya Permasalahan

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Tengah dari sektor pajak, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan beberapa Strategi agar Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah, berikut ini Inovasi yang telah, sedang dan akan lakukan Badan Pendapatan Daerah Daerah :

Inovasi yang Telah dan Sedang dilakukan :

1. Aplikasi Layanan Online 10 Pajak Daerah.
2. Integrasi / host to host secara online pajak BPHTB dengan BPN,dan Integrasi data dengan DPMPTSP serta pembayaran realtime ke Bank Lampung untuk 10 Pajak Daerah.
3. Alat Perekam Transaksi Pembayaran Pajak Restoran, Hiburan, Hotel dan Parkir (Tapping box) online. Yang sudah terpasang sebanyak 30 buah dan yang sudah diusulkan sebanyak 20 buah.
4. Alat Pencatat pemakaian air bawah tanah (QR.CODE) online yang sudah terpasang sebanyak 34 buah. dengan kamera pemantau sebanyak 10 buah.
5. Tanda tangan digital untuk administrasi perpajakan.
6. Pengembangan pemasangan QR-Code Pajak Air Tanah sebanyak 300 buah.
7. Sistem aplikasi Pembayaran Pajak Daerah "Berjaya Tax".
8. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak dan pembayaran E-STPD dan SSPD secara online.
9. OPD yang mengelola retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, dapat melakukan Entri langsung terhadap laporan realisasi melalui web aplikasi Layanan secara online.

Inovasi yang akan dilakukan :

1. Mengikut sertakan ASN untuk mengikuti pelatihan tekhnis dibidang Perpajakan.
2. Pendataan, pemutakhiran data dan monitoring PBB-P2 aplikasi berbasis Geographic Information System (GIS) dan Global Positioning System (GPS).
3. Pemasangan Barcode untuk Objek Pajak Reklame.

4. Akses Aplikasi Layanan Pajak Daerah online berbasis Smartphone (IOS/Android).
5. Memberikan kemudahan pembayaran Wajib Pajak melalui layanan e-channel (Alfamart, Indomart.dll) dan marketplace (tokopedia, shopee, bukalapak, dll).
6. Integrasi NIK ke DISDUKCAPIL dalam rangka pengembangan KSWP dengan DPMPTSP.

C. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam Analisis SWOT, faktor-faktor eksternal (ALE) dibawah ini merupakan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Peluang (Opportunities)

- Dukungan dana dari pemerintah daerah
- Adanya potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
- Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan Perda yang berkaitan dngan pendapatan.
- Partisipasi masyarakat.
- Potensi pajak dan retribusi memadai
- Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Adanya Peraturan Daerah dan Keputusan Lainnya Tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah diidentifikasi beberapa Critical Succes Factor atau faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah dan keputusan lain yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesionalisme di bidang pendapatan daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas.
4. Semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam membayar pajak

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

A. Tujuan

Dalam Rangka mewujudkan Visi dan Merealisasikan Misi Bupati Lampung Tengah yang telah dirumuskan , perlu ditetapkan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi , sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor – faktor kunci keberhasilan organisasi . tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya tujuan maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Secara keseluruhan , yaitu sebagai berikut :

- Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.
- Optimalisasi Pelayanan Prima
- Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi
- Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan

B. Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang dipredisikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mencapai tujuan misi pertama, yaitu:
 - a. Meningkatnya Pendapatan Asli daerah, dengan indikator Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan
2. Sasaran untuk mencapai tujuan misi kedua, yaitu:
 - o Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan
 - o Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai.
 - o Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah
3. Sasaran untuk mencapai tujuan misi ketiga, yaitu:
 - o Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan/organisasi, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah.
 - o Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Badan Badan Pendapatan Daerah.
4. Sasaran untuk mencapai tujuan misi keempat, yaitu:
 - o Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi

- Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi)
5. Sasaran untuk mencapai tujuan misi kelima, yaitu:
- Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.

3.2. Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Program adalah

kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran, tujuan Badan Pendapatan Daerah

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya:

Program dan Kegiatan Kewenangan SKPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2021 merencanakan melaksanakan 2 program dan 30 Sub Kegiatan, Pengukuran Kinerja kegiatan dinilai melalui Indikator yang meliputi input, output, outcome dan benefit . Adapun pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dari hasil pengukuran kinerja masing-masing kegiatan yang secara langsung memiliki keterkaitan erat dengan sasaran yang dimaksud.

Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dapat dilihat Pada **Tabel (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022)**

3.3. Telaahan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peranan penting dalam bidang pendapatan asli daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang pendapatan daerah yang menjadi pedoman bagi stakeholders pengguna anggaran di daerah. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka visi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Berdasarkan visi tersebut, kondisi yang ingin diwujudkan adalah:

1. Pendapatan Daerah yang tertib. Pendapatan Daerah yang tertib dapat diartikan bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Perubahan (APBD) dilakukan secara terencana, sistematis dan tepat waktu.
2. Pendapatan Daerah yang transparan. Pendapatan Daerah yang transparan dapat diartikan bahwa penyusunan pendapatan dalam APBD dilakukan dengan melibatkan seluruh SKPD dan STAKEHOLDER pengguna Anggaran.
3. Pendapatan Daerah yang akuntabel. Pendapatan Daerah yang akuntabel dapat diartikan bahwa Pendapatan Daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan kaidah tata pengelolaan pendapatan daerah yang baik.
4. Pendapatan Daerah yang efisiensi. Pendapatan Daerah yang efisiensi dapat diartikan bahwa pendapatan dalam APBD disusun dengan sesuai potensi yang ada.
5. Pendapatan daerah yang Optimal. Pendapatan daerah yang Optimal dapat diartikan bahwa BPPRD secara terus menerus menggali dan meningkatkan PAD secara Maximal dengan sistem Intensifikasi dan Ekstensif.

MISI

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah merumuskan Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan
- Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak
- Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan

A. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B. I V

P E N U T U P

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang disebut Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki otoritas dalam pendapatan daerah di wilayah Lampung Tengah, telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 yang memuat tentang tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 ini dapat direalisasikan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pogram/kegiatan Badan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan visi, misi, Bupati Lampung Tengah dan tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh unsur dan komponen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002

LAMPIRAN

BAB V.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

KPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN	SASARAN			PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN (Lok /Kec)	TARGET 2022	KETERANGAN (Lok/Kec)
		Uraian	Satuan	Target Indikator						
1		- Menyediakan Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Tertib surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Administrasi Perencanaan Outcome : Tersedianya Dokument Perencanaan	Rp. Tahun tahun	33.592.200 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
2		- Menyediakan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah - Tertib surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Administrasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tersedianya Dokument Evaluasi	Rp. Tahun Tahun	29.570.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

3		- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana Output : Administrasi Gaji Perangkat Daerah Outcome : Tersedianya Gaji ASN	Rp. Tahun tahun	11.376.466.729 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
4		- Penatausahaan keuangan Badan dan urusan perbendaharaan agar pelaksanaan keuangan - Badan berjalan baik Menyediakan kebutuhan rumah tangga Badan agar pelaksanaan tugas terpenuhi dan berjalan baik	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN Outcome : Terlaksananya Kejiata Adm Keuangan ASN	Rp. Tahun tahun	1.764.494.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
5		- Menyediakan Laporan Keuangan Agar pelaksanaan tugas terpenuhi dan berjalan baik - Tertib surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Input : Dana Output : Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Kejiata Adm Keuangan	Rp. Tahun tahun	32.291.500 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

6		- Pendidikan dan pelatihan Formal Guna Peningkatan SDM	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : Dana Output : Terlaksananya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Outcome : Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek	Rp. Tahun Tahun	25.000.000 10 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
7		- Penyediaan Komponen Instalansi Penerangan Gedung kantor	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Komponen Instalansi Penerangan Gedung kantor	Input : Dana Output : Komponen Instalansi Penerangan Gedung Kantor Outcome : Tersedianya Komponen Instalansi Penerangan Gedung Kantor	Rp. Tahun tahun	10.466.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
8		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Tahun tahun	214.050.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
9		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana Output : Peralatan Rumah Tangga Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Rp. Tahun tahun	19.907.500 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

10		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kebutuhan Kantor	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana Output : Barang Cetak dan Penggandaan Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	Rp. Tahun tahun	168.778.600 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
11		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. Tahun tahun	128.840.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
12		- Penyediaan Kebutuhan Kendaraan Dinas / Oprasional	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana Output : Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. Unit Unit	800.640.000 5 5	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
13		- Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Input : Dana Output : Komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Penerangan Lampu jalan dan Kantor	Rp. Tahun tahun	28.443.312.396 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

14		- Perawatan Randis Operasional - Perpanjangan STNK Randis	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Randis Operasional Outcome : Pemeliharaan Randis Operasional	Rp. Unit Unit	318.190.000 21 21	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
15		- Pemeliharaan Peralatan Kantor guna penunjang tugas kedinasan	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp. Tahun Tahun	185.030.800 146 146	Kantor BPPRD Kab. Lampung Tengah
16		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. Tahun Tahun	59.850.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
17		- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Input : Dana Output Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target PAD	Rp. Tahun Tahun	34.194.000 10 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

18	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti SPPT yang bermasalah di lapangan - Evaluasi dan validasi SPPT bermasalah - Mengakuratkan data pada database 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Input : Dana Output : Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. Tahun Tahun	84.672.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
19	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Outcome : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. Tahun Tahun	77.494.600 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
20	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalan Alat Perekam Transaksi Usaha - Peninjauan dan Pengawasan alat perekam transaksi usaha 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Realisasi Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target PAD	Rp. Tahun Tahun	36.772.600 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

21		- Pelayanan pendataan dan pendaftaran wajib pajak	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Wajib Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target PAD	Rp. Tahun Tahun	223.133.900 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
22		- Menghimpun dan mengolah data pajak/retribusi daerah untuk mewujudkan database pajak dan retribusi daerah yang baik - Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pajak/Retribusi Daerah - Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keuangan/perbankan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dalam rangka pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah dengan pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi - Dokumen laporan data transaksi pajak daerah secara periodik - Menyelenggarakan upaya upaya peningkatan kualitas SDM dibidang TI Pajak/Retribusi Daerah	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Outcome : Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. Tahun Tahun	395.075.500 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

		Menyusun rancangan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan TI pajak/retribusi daerah								
23		<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian, perhitungan dan penetapan data PBB - Penilaian objek pajak dalam rangka penentuan besarnya NJOP - Analisa perhitungan dan Penetapan besaran pengenaan PBB - Pencetakan dan penerbitan SPPT tunggakan 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Input : Dana Output : Tersedianya data perhitungan dan Ketetapan pajak PBB Outcome : data perhitungan dan Ketetapan pajak PBB	Rp. Tahun Tahun	670.181.600 1 1	28 Kecamatan
24		<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian, perhitungan dan penetapan data pajak rumah makan dan pajak hotel - Penilaian Objek Pajak dalam rangka penentuan besarnya nilai Pajak yang akan dikenakan - Analisa perhitungan dan penetapan besaran nilai pajak pencetakan dan penerbitan STTS - Melaksanakan perhitungan nilai objek pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba sebagai bahan penetapan jumlah pajak. 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target PAD	Rp. Jenis Pajak Jenis Pajak	95.358.800 10 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

25		- Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Input : Dana Output : Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Outcome : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. Tahun Tahun	78.887.500 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
26		- Memutakhirkan data pajak rumah makan dan pajak hotel - Intensifikasi pajak hotel dan pajak rumah makan - Evaluasi dan mengakuratkan pada data base	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Intensifikasi Pajak Daerah Outcome : Intensifikasi Pajak Daerah	Rp. Tahun Tahun	40.744.000 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
27		- Pencetakan dan penerbitan SPPT massal Penelitan dan up date data peta PBB - Pendistribusian SPPT PBB massalPenyelesaian keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pendistribusian SPPT PBB, Tersedianya data Omzet Pajak & Penyelesaian Keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, Pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi Outcome : Pendistribusian SPPT PBB, Tersedianya data Omzet Pajak & Penyelesaian Keberatan PBB meliputi pembetulan, pembatalan, Pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi	Rp. Jenis Pajak Jenis Pajak	158.183.400 1 1	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

28	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola Pajak Rumah Makan, Hotel dan BPHTB dengan baik - Penilaian objek Pajak Rumah Makan, Hotel dan BPHTB dengan cara cek lokasi - Penetapan Pajak Rumah Makan, Hotel dan BPHTB yang tepat - Pelayanan keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak Reklame, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Minerba 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Realisasi Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target PAD	Rp. Jenis Pajak Jenis Pajak	75.235.600 10 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
29	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Sistem dan prosedur kerja pemungutan pajak daerah - Penagihan terhadap wajib pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo - Penertiban dan atau tindakan terhadap pelanggran oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan - Pembinaan dan bimbingan teknis operasional terhadap unit kerja pengelola pendapatan asli daerah - Evaluasi dan koordinasi pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah Outcome : Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	Rp. Jenis Pajak Jenis Pajak	68.977.800 10 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah
	<ul style="list-style-type: none"> - Rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi 	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Potensi	Rp. Jenis Pajak	42.075.700 10	Kantor BAPENDA Kab. Lampung Tengah

30		<ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan program pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah - Menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah - Pengkajian potensi dan produk hukum Pajak dan Retribusi Daerah Pembinaan teknis dibidang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Pengkajian Implementasi produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah 				Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah Outcome : Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jenis Pajak	10	
----	--	---	--	--	--	--------	---	-------------	----	--

Gunung Sugih, Januari 2022

**KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Drs. ASRUL SANI
NIP. 19660621 198603 1 002